

# PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH DI BIDANG PENGOLAHAN IKAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERDAYAAN UMKM JANGKA PANJANG

Amimah Oktarina

Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta  
Alamat: Pondok Pesantren Kauman Desa Karangturi Kec. Lasem Rembang 59271  
E-mail: mimitari92@gmail.com

**Abstract:** *Corporate Social Responsibility Program For Islamic Banking In Fish Processing As An Alternative Of Long-Term SMEs Development.* The growth of Islamic banking in Indonesia increasingly show the seriousness of the financial institutions in providing services to the community. However, the Islamic banking program of CSR does not aware yet the field of fish processing. Currently, Indonesian government began intense to empower the processed fish for the benefit of society. In Yogyakarta, the government is conducting "Gemarikan" to increase public interest in fish consumption. Based on these opportunities, the Islamic banking CSR program is directed to provide capital for SMEs conducting production activities in the field of fish processing.  
**Keywords:** CSR, Islamic Banking, SMEs

**Abstrak:** *Program Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah di Bidang Pengolahan Ikan sebagai Alternatif Pemberdayaan UMKM Jangka Panjang.* Dewasa ini Perbankan Syariah telah berkembang pesat, hal ini dapat dilihat dari keseriusan Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, salah satu program Bank Syariah yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) belum menyadari untuk ikut andil dalam memberdayakan UMKM di bidang pengolahan ikan. Padahal, saat ini pemerintah Indonesia sangat intens dalam memberdayakan pengolahan ikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Yogyakarta, Pemerintah melakukan "Gemarikan" untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi Bank Syariah melalui program CSR yang ditujukan untuk menyalurkan modal bagi UMKM dalam meningkatkan jumlah produksi di bidang pengolahan ikan.  
**Kata kunci:** CSR, Bank Syariah, UMKM

## Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan elemen penting yang berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Jumlah pelaku sektor ini menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia mencapai 55,2 juta unit usaha atau sebesar 99,9% dari seluruh unit usaha di Indonesia dan memperkerjakan 101,7 juta pekerja (97,2%)<sup>1</sup>. Jumlah persentase UMKM yang dominan tersebut menunjukkan bahwa kemampuannya bertahan pada badai krisis tahun 1998 hal ini karena UMKM tergantung pada muatan lokal dengan menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia (SDM), bahan baku dan peralatan.

Meski peluangnya yang besar dalam pengembangan ekonomi, namun angka yang ditunjukkan hanya memberikan sumbangan devisa (ekspor-impor) hanya sebesar 16,4%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM tidak mengalami perubahan yang signifikan sehingga terjadi kelambanan UMKM menjadi usaha besar. Dengan berbagai hambatan yang dihadapi UMKM, maka pemerintah dan pihak terkait semestinya berperan aktif dalam mendorong sektor ini.

Salah satu bidang usaha yang dapat dikembangkan untuk sektor UMKM adalah pengolahan ikan. Konsumsi ikan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, konsumsi ikan di Indonesia berkisar 33,8 kilogram per kapita pertahun, sedangkan pada tahun 2013 konsumsi ikan di Indonesia meningkat

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, 2011

menjadi 35,6% kilogram per kapita per tahun. Pada tahun 2014, konsumsi ikan di Indonesia akan ditingkatkan lagi mencapai 38 kilogram per kapita per tahun. Peningkatan ikan ini didukung oleh program pemerintah Indonesia dengan mengadakan program nasional yaitu Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Program pemerintah ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk mengonsumsi ikan dibandingkan daging lainnya. Hal ini karena kandungan gizi yang terkandung dalam ikan lebih baik dibandingkan dengan daging lainnya seperti ayam dan sapi. Perbandingan kandungan gizi ikan, ayam, dan daging sapi dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Kandungan Gizi Ikan, Ayam, dan Daging Sapi

No	Kandungan Gizi	Jenis Daging (% 100gr)		
		Ikan	Ayam	Sapi
1.	Protein	43,76	18,20	22
2.	Lemak	7,01	25	13
3.	Air	4,28	0,74	65

Sumber: Murtidjo, 2003; Prasetyo, 2013; Purwani, 2013

Berdasarkan tabel 1.1. kandungan gizi protein yang terdapat dalam ikan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis daging lainnya. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menggalakan masyarakat agar hidup sehat dengan mengonsumsi ikan. Di Yogyakarta, produksi perikanan meningkat 7% pada tahun 2013 (Sujatmiko, 2013). Pelaku industri menangkap kesempatan tersebut. Salah satu UMKM yang muncul sebagai industri pengolahan ikan di Yogyakarta adalah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mino Ngudi Lestari yang mendapatkan kucuran dana CSR dari Pertamina.

Program CSR tidak hanya terdapat pada perusahaan sejenis Pertamina saja, tetapi juga pada perbankan syariah. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia kini sudah terbukti secara nyata melalui banyaknya bermunculan institusi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada Juni 2016, Indonesia memiliki 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha

Syariah (UUS) dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>2</sup> Semakin bertambahnya perbankan yang muncul memicu ketatnya persaingan antar pelaku bisnis perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional.

Untuk dapat bersaing secara kompetitif, perbankan syariah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya baik dalam pelayanan, produk, maupun kepedulian terhadap masyarakat untuk meningkatkan potensi masyarakat dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan peran perbankan syariah terhadap UMKM. Kepedulian terhadap masyarakat dapat diwujudkan dengan peran aktif perbankan syariah dalam mendorong UMKM. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat BSM) dalam mengelola CSR. BSM menempatkan CSR sebagai bagian program jangka panjang perusahaan.

Pilar konsep CSR BSM diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal, peningkatan kompetensi, dan membangkitkan jiwa wirausaha. Hal ini sejalan dengan tujuan dasar implementasi CSR, bahwa BSM sebagai entitas bisnis perbankan mesti memiliki kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan membantu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat menjadi komunitas yang mandiri secara ekonomi. BSM merealisasikan berbagai kegiatan pengembangan potensi ekonomi masyarakat dengan satu tujuan, meningkatkan kemampuan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<sup>3</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, UMKM yang mendapatkan kucuran dana CSR dari BSM belum ada di bidang pengolahan ikan. Padahal, bidang ini apabila dapat dikembangkan secara optimal dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan usaha mandiri masyarakat yang tidak hanya manfaat komersial tetapi juga memberikan kegiatan positif dan produktif bagi masyarakat sekitar jangka panjang.

Oleh karena itu, dengan menjadikan UMKM UPI Mino Ngudi Lestari yang tumbuh dan

<sup>2</sup> OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, Juni 2016.

<sup>3</sup> Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri, 2014.

berkembang pasca memperoleh CSR dari Pertamina sebagai model UMKM di bidang pengolahan ikan. Sementara BSM sebagai perbankan syariah yang gencar membantu program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi dana CSR pada UMKM, maka dapat dijadikan model bagi perbankan syariah lainnya untuk dapat mengoptimalkan pendistribusian CSR kepada UMKM di bidang pengolahan ikan.

### Rumusan Masalah

- a. Bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan UMKM pengolahan ikan melalui CSR bank syariah?
- b. Bagaimana model yang tepat dalam mendukung pemberdayaan UMKM pengolahan ikan melalui CSR bank syariah?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan UMKM pengolahan ikan melalui CSR bank syariah.
- b. Mengetahui model yang tepat dalam mendukung pemberdayaan UMKM pengolahan ikan melalui CSR bank syariah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, sebagai pengembangan keilmuan di bidang ekonomi mikro, khususnya dalam konsentrasi *corporate social responsibility* bank syariah dalam hubungannya dengan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah pengolahan ikan. Menemukan model yang tepat dalam rangka pemberdayaan UMKM khususnya pengolahan ikan.
- b. Secara praktis, 1) sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu CSR bank syariah; 2) sebagai motivator untuk meningkatkan kualitas kerja Bank Syariah; 3) sebagai penambah keilmuan tentang model pemberdayaan UMKM pengolahan ikan melalui CSR bank syariah.

### Landasan Teori

#### 1. Corporate Social Responsibility (CSR)

*Corporate Social Responsibility* adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab sosial di bidang hukum.

Philip Kotler mendefinisikan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai tanggung jawab sosial korporat adalah sebuah komitmen untuk mengembangkan masyarakat melalui praktek bisnis. Mengikuti pertimbangan sendiri dan kontribusi sumber-sumber perusahaan.

Berikut beberapa definisi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan:

Menurut Yusuf Wibisono, CSR adalah keseluruhan pengertian, evolusi, dan perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitikberatkan pada perhatian, jalinan, dan sumbangan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha baik kepada karyawan, masyarakat, maupun lingkungan.

*Corporate Social Responsibility* menurut Hackston dan Milne (1996) dalam Widiawati (2012) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan) di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham seperti yang dinyatakan oleh Gray *et. al* (2001) dalam Yulfaida (2012).

*World Business Council for Sustainable Developments* (2008) dalam Purwitasari (2011) menjelaskan CSR sebagai:

*“The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”.*

*Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, me-

lalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.<sup>4</sup>

CSR dianggap sebagai komitmen yang berkelanjutan dari kegiatan bisnis untuk berperilaku secara etis. Diharapkan CSR dapat memberi kontribusi dan meningkatkan taraf hidup lingkungannya. Disamping itu, menurut Natufe dengan mengutip definisi dari WBCSD (*World Business Council for Sustainable Development*) menyebut tanggung jawab sosial korporat (CSR) sebagai komitmen berkelanjutan di kalangan bisnis. Untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi. Sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan.

Pilar dasar dari definisi yang dikutip oleh Natufe tersebut mencakup:

- a. Mendorong kesejahteraan ekonomi;
- b. Perbaiki lingkungan hidup; dan
- c. Tanggung jawab sosial

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam prinsip *good corporate governance* (GCG) ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama penting dan tak terpisahkan. Salah satu dari empat prinsip GCG yaitu prinsip *responsibility*. Tiga prinsip lainnya yaitu *fairness*, *transparency*, dan *accountability*. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara prinsip *responsibility* dengan tiga prinsip GCG lainnya. Tiga prinsip GCG pertama lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (*shareholders*), sedangkan dalam prinsip *responsibility*, penekanan yang signifikan diberikan kepada *stakeholders* perusahaan<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian tentang CSR di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian CSR

secara umum, yaitu bentuk tanggung jawab dan kewajiban perusahaan untuk memberi umpan balik atas aktivitasnya pada lingkungan sosial sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas tetapi juga memberikan manfaat sosial.

*Corporate Social Responsibility* dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inern dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid alsyariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan.<sup>6</sup>Selain itu, dalam perspektif Islam CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatanbaik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah Swt. Artinya bahwa setiap perusahaan yang melakukan berbagai aktivitas bisnis dalam rangka memperoleh keuntungan tetapi juga dibatasi oleh tanggung jawab khususnya kepada Allah Swt.

CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah.<sup>7</sup> Sebagai khalifah yang mengemban amanah, artinya bahwa manusia memiliki pertanggungjawaban atas hal ini. Manusia memahami hakikatnya terhadap kepemilikan di dunia yang semata-mata bertugas untuk mengelola dan menjaga kemakmuran bumi dengan tidak berlaku semena-mena sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Oleh sebab itu, dalam hal ini CSR juga memiliki hubungan erat dengan etika Islam. Naqvi mengungkapkan bahwa titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan.<sup>8</sup> Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya,

<sup>4</sup> Rika Nurlela dan Islahuddin, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)", Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008

<sup>5</sup> Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 136.

<sup>6</sup> M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Kasus Pada Bank Syariah di DIY", *Jurnal Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No.1, Januari 2008.

<sup>7</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 160.

<sup>8</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 35.

dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik, yaitu:

a. Tauhid

Konsep *Tauhid* merupakan dimensi vertikal Islam yang memadukan berbagai aspek dalam kehidupan manusia yaitu politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.<sup>9</sup> Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni keesaan Tuhan.<sup>10</sup>

Landasan ini mengindikasikan bahawa adanya hubungan vertikal diwujudkan dengan penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya.<sup>11</sup> Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuan-Nya.

b. Landasan Keseimbangan

Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.<sup>12</sup> Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan agar seimbang, adil dan sepadan.

c. Landasan Kehendak Bebas

Dalam berbisnis, Islam memberikan kebebasan bagi manusia dalam mendayagunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki termasuk didalamnya kebebasan berkreasi, bertransaksi atau

berinvestasi. Namun dalam mendayagunakan potensi tersebut, manusia membutuhkan bantuan orang lain sehingga penciptaan kerja sama yang baik antar sesama sangat diperlukan.

d. Landasan Pertanggungjawaban

Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi-tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi masyarakat).<sup>13</sup> Kebebasan manusia dalam menggunakan potensi sumber daya semestinya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak dipergunakan sebebas-bebasnya tanpa batas, melainkan dibatasi oleh hukum, norma, dan etika yang tertuang dalam Alquran dan hadis sebagai acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya.

Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosial (CSR) terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu<sup>14</sup>:

a. Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap para pelaku dalam perusahaan dan *stakeholder*

*Stakeholder* terdiri dari investor atau pemilik, kreditor, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah dan masyarakat. Islam mendorong terwujudnya hubungan kemitraan antara pelaku bisnis dengan *stakeholders* internal maupun eksternal perusahaan dalam hal kebaikan dan saling menguntungkan.

b. Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap lingkungan alam

Bagian utama yang juga harus diperhatikan dalam kaitannya dengan CSR adalah lingkungan alam. Lingkungan alam dapat berupa lingkungan alam biotik ataupun abiotik, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui.

c. Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap kesejahteraan sosial secara umum

Selain bertanggung jawab terhadap pihak yang berkepentingan terhadap usahanya dan lingkungan alam, perbankan syariah juga sudah seharusnya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan umum masyarakat. Islam selalu

<sup>9</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ekonomi Islam*, h. 78.

<sup>10</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis...*, h.12.

<sup>11</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas...*, h. 37.

<sup>12</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 55.

<sup>13</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h. 57.

<sup>14</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.63.

menyeru untuk berbuat kedermawanan terhadap kaum lemah, miskin dan marginal.

CSR dalam Bank Umum Syariah merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penilaian kinerja sosial Bank Umum Syariah. Penilaian tersebut adalah penilaian atas Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) dimaksudkan untuk nilai kontribusi langsung Bank Umum Syariah kepada masyarakat, di antaranya untuk nasabah yang sedang membutuhkan dan masyarakat miskin. Penilaian ini penting mengingat Bank Umum Syariah juga diharuskan untuk menjalankan peran sosialnya terutama berkaitan dengan distribusi zakat, memberikan pembiayaan kebajikan (*qard*) dan bahkan juga pendidikan publik.

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya keterlibatan perusahaan dalam program CSR antara lain<sup>15</sup>:

a. Kebutuhan dan Harapan Masyarakat yang Semakin Berubah

Untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat agar tetap bisa *survive*, maka perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus peka terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang selalu berubah.

b. Terbatasnya Sumber Daya Alam

Dengan adanya sumber daya alam yang sangat terbatas, maka usaha perbankan syariah juga harus menggunakannya SDA seefisien mungkin.

c. Menciptakan Lingkungan Sosial yang Lebih Baik

CSR yang diimplementasikan bank syariah akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan memberikan lingkungan sosial yang seimbang.

d. Mengimbangi antara Tanggung Jawab dan Kekuasaan

Bisnis sangat mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat, kehidupan moral dan budaya masyarakat. Maka, kekuasaan yang sangat besar ini harus diimbangi dengan program tanggung jawab sosial agar kekuasaan

yang tak terbatas bisa dikendalikan.

e. Keuntungan Jangka Panjang

Keterlibatan sosial merupakan nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan jangka panjang. Karena bank syariah yang bersangkutan akan mendapatkan citra positif di mata masyarakat. Tidak bisa disangkal lagi, bahwa bisnis akan tetap bertahan jika kepentingan semua pihak dapat diperhatikan dan terpenuhi.

## 2. Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sinour Yosephus mengungkapkan bahwa CSR dikonsepsikan sebagai suatu piramid yang terdiri dari empat macam unsur tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan, sebagai berikut<sup>16</sup>:

a. Tanggung jawab ekonomi (*Economic responsibilities*)

Tanggungjawab ekonomi merujuk pada fungsi utama bisnis yang bersifat *profit oriented*. Aktivitas ekonomi dalam *profit oriented* akan bersinergi dengan CSR jika didasari oleh itikad untuk memberikan *price* yang memihak pada nasabah, artinya *price* merupakan representasi dari kualitas dan nilai sebenarnya dari produk (barang ataupun jasa).

b. Tanggung jawab hukum (*Legal responsibilities*)

Saat perbankan syariah memutuskan untuk menjalankan operasinya di wilayah tertentu maka ia telah sepakat untuk melakukan kontrak sosial dengan segala aspek norma dan hukum yang telah ada maupun yang akan muncul kemudian. Tanggung jawab hukum mengupayakan bahwa bank syariah selalu mematuhi terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan melakukan hal yang melawan hukum.

c. Tanggung jawab etis (*Ethical Responsibilities*)

Tanggung jawab etis berimplikasi pada kewajiban menyesuaikan segala aktivitas sesuai dengan norma sosial dan etika yang berlaku meskipun tidak tertera dalam bentuk tertulis

<sup>15</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h.129-132

<sup>16</sup> Sinour Yosephus, *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*; (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h.298

formal. Tanggung jawab etis ini bertujuan untuk memenuhi standar, norma dan pengharapan dari *stakeholder* terhadap bank syariah. Tanggung jawab etis juga sebuah bentuk korporat yang senantiasa menjunjung kearifan dan adat lokal.

d. Tanggung jawab Filantropis (*Philanthropic responsibilities*)

Tanggung jawab filantropi adalah tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif bank syariah dalam memajukan kesejahteraan manusia. Jaditanggung jawab filantropi didasari oleh iktikad bank syariah untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas secara mikro maupun makro sosial.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh:

- 1) Sektor Mikro dapat dikembangkan hampir di semua sektor usaha dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Karena sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektormikro juga sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.
- 3) UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- 4) UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variabel yang mudah menyesuaikan dengan perubahan/perkembangan yang terjadi.
- 5) Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar

merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

- 6) UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (*grassroot*) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif.

Adapun peranan UMKM yang sangat strategis dan penting ditinjau dari berbagai aspek. *Pertama*, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. *Kedua*, potensinya yang besar dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha dengan skala lebih besar. *Ketiga*, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan. *Keempat*, memiliki sumbangan kepada devisa negara dengan nilai ekspor yang cukup stabil.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian yaitu UMKM Pengolahan ikan di DIY dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa pada satu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yakni menggunakan teknik analisa deskriptif.

### 2. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, subjek penelitian adalah UMKM pengolahan ikan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memperoleh sertifikat hallal dari LPPOM MUI DIY, UMKM Pengolahan ikan di DIY dipandang perlu untuk diteliti karena saat ini pemerintah DIY sedang gencar melakukan gerakan “Gemarikan” untuk menciptakan pola konsumsi daging ikan. Model UMKM yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM UPI Mino Ngudi Lestari.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menggali sumber data primer dengan cara melakukan wawancara

langsung kepada informan penelitian. Sistem wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sistem wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi saat wawancara dilakukan.<sup>17</sup>

#### b. Observasi

Teknik ini untuk memperoleh data berkenaan dengan mengamati perilaku, proses kerja dan gejala-gejala yang menjadi objek survei pada penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hubberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh<sup>18</sup>. Proses analisa data pada penelitian ini terdiri dari:

#### a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis melalui reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

#### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay (menyajikan) data. Pada penelitian penyajian data berupa teks yang bersifat naratif.

#### c. *Conclusion Drawing* (*Verification*)

Apabila data telah disajikan dalam bentuk teks naratif, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah sesuai dengan hasil penelitian.

## Pembahasan

### Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan UMKM Pengolahan Ikan Melalui *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah

Di tengah gencarnya gerakan pemerintah dalam sektor budidaya hasil laut, maka menjadikan sebuah peluang besar bagi masyarakat untuk

<sup>17</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985), h. 2.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)



mengembangkan perekonomian dalam bidang pengolahan ikan. Kehadiran UMKM sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan partisipasinya dalam rangka memperbaiki perekonomian seyogianya dapat menjadi angin segar bagi berbagai pihak untuk ikut memberikan dukungan. Khususnya, UMKM yang bergerak di bidang pengolahan ikan.

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan salah satu provinsi yang sedang intens melakukan berbagai kegiatan di bidang pemberdayaan UMKM. Salah satunya adalah bidang pengolahan ikan mengingat gerakan GEMARIKAN yang diusung untuk meningkatkan minat konsumsi daging ikan oleh masyarakat.

UMKM UPI Mino Ngudi Lestari yang merupakan salah satu UMKM bergerak dalam pengolahan ikan menjadi model dalam penelitian ini. UPI ini telah memproduksi produk hasil olahan ikan yang sudah didistribusikan di berbagai tempat dan secara kontinu. Pada tahun 2011, Pertamina DPPU Adisutjipto melalui program CSR-Pertamina membantu kelompok Pembudidaya Ikan (KPI) Mino Ngudi Lestari dusun Nayan berupape latihan budidaya ikan nila, pakan dan bibit serta pendampingan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan para petaniikan di Dusun Nayan. Pada bulan Juli 2012, berbekal hasil pelatihan budidaya ikan nila tersebut, industri ini mulai memproduksi *Baby Nila Crispy* dengan jumlah tenaga pekerja sebanyak 20 orang.

Pasca diresmikan pada tanggal 9 September 2012 UPI Mino Ngudi Lestari diresmikan oleh Dirjen P2HP, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ir. Saud Hutagalung, MSc., dan Bupati Sleman Sri Purnomo., UPI Mino Ngudi Lestari mulai memproduksi *frozen food*. Selain menambah produk yang diproduksi, *frozen food* diproduksi ketika tidak ada bahan baku untuk memproduksi nila *crispy*. *Frozen food* yang diproduksi oleh UPI Mino Ngudi Lestari berupa bakso, otak-otak, dan *nugget*, dengan semakin besarnya permintaan produk olahan ikan, pada bulan Januari 2014 UPI Mino Ngudi Lestari mulai menambah jenis produknya lagi, yaitu sosis, rolade, dan stik jani.

Untuk mendukung proses produksi, UPI Mino Ngudi Lestari memiliki fasilitas produksi sebagai

bantuan CSR dari Pertamina berupa peralatan dan perlengkapan seperti bangunan produksi, ruang kantor, sepeda motor yang dilengkapi dengan bak, *chiller*, *freezer*, *spinner*, kolam penampungan ikan, *sealer* dan sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pengelola UPI, Heri Santoso sebagai UMKM yang melakukan misi untuk memberdayakan masyarakat sekitar dengan melakukan kegiatan produksi olahan ikan, bantuan CSR sangat berkontribusi dalam pengembangan UMKM tersebut. Melalui bantuan CSR, usaha yang dirintis oleh sebagian masyarakat melalui kelompok yang dibentuk, maka UMKM ini dapat berkembang dan berjalan secara kontinu dalam rangka memenuhi permintaan pasar pada produk hasil olahan ikan yang semakin meningkat.

Perbankan syariah yang merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar dalam perekonomian. Dana CSR yang terdapat pada perbankan syariah diarahkan untuk memberikan bantuan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan permodalan. Namun, berdasarkan data dari BSM sebagai bank yang dijadikan model pada penelitian ini, penyaluran dana CSR belum menyentuh sektor perikanan khususnya UMKM bidang pengolahan ikan.<sup>19</sup>

Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan kredit investasi masih sangat terbatas. Bagi UMKM, keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar. Di samping persyaratan pinjamannya yang tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan; serta adanya paradigma pada dunia perbankan yang memandang UMKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi. Setiap tahun, untuk skala jumlah pinjaman dari perbankan sampai Rp. 50 juta, terserap hanya sekitar 24% kesektor produktif, selebihnya terserap ke sektor konsumtif.

Sebuah gagasan yang dibentuk untuk mengarahkan penyaluran dana CSR perbankan menyentuh langsung kebutuhan UMKM untuk pengembangan usahanya. Adapun hal-hal yang

<sup>19</sup> Laporan Tahunan BSM, 2014

menjadi faktor pendukung dan penghambat suatu UMKM dalam pengembangan usahanya yang diharapkan mampu ditangkap oleh kucuran dana CSR dari perbankan syariah agar tepat guna, yaitu:

### 1. Faktor pendukung

UMKM di bidang pengolahan ikan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Di Yogyakarta sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi LPPOM MUI DIY periode Juni 2016 bahwa ada lebih dari 50 UMKM yang bergerak di bidang pengolahan ikan sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI. Artinya secara legalitas, UMKM yang ada telah memiliki jaminan kehalalan untuk dikonsumsi. Selain itu, permintaan pasar yang terus meningkat terhadap produk hasil olahan ikan, seperti *nugget*, bakso, otak-otak, rolade yang tidak hanya untuk konsumsi masyarakat umumnya tetapi juga sebagai jajanan anak sekolah. Terlebih saat ini banyak kasus yang terjadi terkait jajanan anak sekolah yang mengandung bahan makanan berbahaya. Produk hasil olahan ikan dan diolah oleh pihak yang sudah memperoleh legalitas layak konsumsi dan halal sangat diperlukan untuk menjadi solusi atas “ketakutan” anak sekolah dalam mengonsumsi jajanan yang ada. Program CSR yang ada di perbankan syariah, belum menyentuh ranah permodalan pada UMKM di bidang pengolahan ikan. Mengingat besarnya peluang pengembangan usaha jenis ini, maka dapat menjadi peluang besar bagi perbankan syariah untuk dapat melakukan permodalan dari dana CSR dalam mendukung operasional yang dibutuhkan UMKM, seperti mesin, perlengkapan operasional, dan lain-lain.

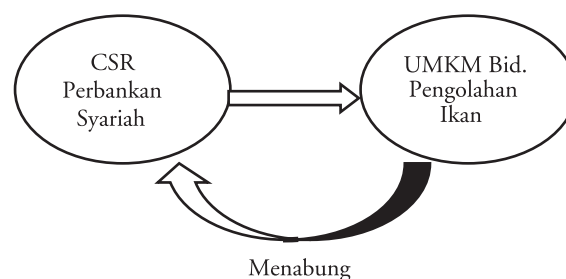
### 2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola UMKM UPI Mino Ngudi Lestari yang dijadikan model dalam penelitian ini, adapun beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam pengembangan UMKM di bidang pengolahan ikan untuk jangka panjang di antaranya adalah UMKM masih memiliki keterbatasan dalam pemasaran produk, artinya produk yang dihasilkan hanya dapat dipasarkan pada pasar tertentu saja dan

masih secara lokal. Keterbatasan pemasaran ini karena kurangnya sumber daya manusia yang dapat berkontribusi untuk perluasan segmen pasar. Dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini memberdayakan hasil olahan UMKM secara instens mengingat UMKM adalah gerakan “mikro” yang dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian “makro”. Selain itu, permasalahan *packaging* produk hasil UMKM juga masih menjadi kendala yang dihadapi, sehingga permodalan yang ada dapat dijadikan solusi untuk memperbaiki *packaging* produk. Produk hasil dari UMKM ini harus mampu bersaing di pasaran dengan tidak hanya kualitas produk saja, tetapi juga secara *packaging* memberikan kemasan yang menarik untuk dapat meningkatkan minat beli masyarakat. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah manajemen pengelolaan UMKM yang masih perlu dibenahi. Pengetahuan masyarakat yang bergerak di UMKM dalam memajemen usaha masih perlu memperoleh pelatihan khusus agar dapat mengelola usaha dengan baik dan optimal.

### Model Pemberdayaan UMKM Pengolahan Ikan melalui CSR Bank Syariah

Program CSR perbankan syariah yang digagas untuk dapat diarahkan pada permodalan UMKM di bidang pengolahan ikan ini diharapkan dapat menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu pionir dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Model pemberdayaan UMKM melalui CSR perbankan syariah dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut:



Gambar 1.1. Model Program CSR Perbankan untuk UMKM Bidang Pengolahan Ikan

Berdasarkan gambar 1.1 model yang ditawarkan dalam rangka pengembangan UMKM khususnya

bidang pengelolaan ikan yang dipandang berpotensi untuk dapat dikembangkan. Melalui dana CSR yang diberikan dari Perbankan Syariah untuk dapat menjadikan UMKM bidang pengolahan ikan menjadi salah satu pos yang diberikan modal, maka dapat didayagunakan secara optimal oleh UMKM. Mekanisme pemilihan UMKM yang diberikan dana CSR adalah berdasarkan pertimbangan perbankan syariah untuk dapat memberikan dananya bagi UMKM yang baru akan berkembang dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan penunjang.

UMKM yang memperoleh dana CSR dari perbankan syariah mengelola dan mengoperasikan usaha/industri secara berkelanjutan. Pengelola dan tenaga kerja melakukan kegiatan produksi secara kontinyu untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan perbankan syariah saat ini, maka masyarakat dapat menabung di perbankan syariah yang memberikan dana CSR tersebut. Hal ini sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah di Indonesia.

### Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mengembangkan UMKM bidang pengolahan ikan yang dianggap memiliki potensi besar mengingat produk hasil olahan ikan saat ini banyak diminati. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah Yogyakarta yaitu gerakan “Gemarikan” yang bertujuan untuk meningkatkan minat konsumsi ikan. Melihat faktor pendukung yang dapat memberikan kemudahan untuk mengaplikasikan program CSR perbankan syariah untuk pengembangan UMKM bidang pengolahan ikan maka diharapkan UMKM tersebut dapat mampu memanfaatkan kucuran dana CSR perbankan syariah secara optimal, sehingga dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas UMKM untuk dapat memproduksi dan memenuhi permintaan pasar terhadap produk hasil olahan ikan.

### Pustaka Acuan

Anto, M.B. Hendrie dan Dwi Retno Astuti, “Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan

*Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY*”, *Jurnal Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No.1, Januari 2008.

Badan Pusat Statistik, 2011.

Beekum, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Darwin, Ali, “Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia”, *Konvensi Nasional Akuntansi V*, Program Profesi Lanjutan, Yogyakarta, 13-15 Desember 2004.

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2007.

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985.

Keraf, Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakaria, 2006.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Murtidjo, B.A., *Pemotongan dan Penanganan Daging Ayam*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.

Naqvi, Syed Nawab Haidar, *Menggagas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Nurlela, Rika dan Islahuddin, “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)”, *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak, 23-24 Juli 2008.

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Juni 2016*, (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, diakses pada 10 Juli 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985.

Wibowo, Muh. Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007

Yosephus, Sinuor, *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.